

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang termasuk dalam salah satu agenda rencana pembangunan nasional. Tujuan dari Pembangunan Nasional negara Indonesia yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah (termasuk pedesaan dan perkotaan). Namun dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sampai saat ini masalah pengembangan wilayah perbatasan belum terselesaikan. Kawasan perbatasan di Indonesia hampir keseluruhannya merupakan daerah tertinggal dengan kondisi yang memprihatinkan sebagai wajah luar negara. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan kurang diperhatikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Masalah ini dapat dilihat dari kebijakan pembangunan yang pada umumnya kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan pembangunan yang ada lebih difokuskan pada wilayah yang tinggi kepadatan penduduknya, aksesibilitas yang mudah, serta potensial, dibandingkan dengan pembangunan bagi wilayah terpencil atau terisolir dan tertinggal seperti wilayah perbatasan yang belum diprioritaskan sepenuhnya (Bappenas.2004). Daerah perbatasan merupakan suatu kawasan tertentu yang mempunyai peran penting dan sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan nasional. Wilayah atau kawasan perbatasan mempunyai potensi sumberdaya yang berdampak pada perekonomian dan penggunaan ruang wilayah yang pemanfaatannya cukup besar dan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam daerah maupun di luar daerah. Selain itu, kawasan perbatasan berkaitan erat dengan kegiatan di daerah perbatasan negara dan kawasan perbatasan antarnegara yang berdampak pada fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, pembangunan kawasan perbatasan

Indonesia menjadi salah satu prioritas terpenting dalam pembangunan nasional untuk menjamin keamanan, ketertiban serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, dan salah satunya adalah Timor Leste. Daerah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Kupang. Kondisi wilayah perbatasan darat Provinsi NTT pada umumnya merupakan wilayah perbatasan tertinggal. Kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan tergolong rendah. Selain itu, sarana dan prasarana aksesibilitas, prasarana dan sarana penunjang aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan masih sangat terbatas. Priyanto dan Dwiyatno (2014) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan sosial masyarakat maupun perekonomian penduduk wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste termasuk dalam tingkat rendah sampai sangat rendah. Kegiatan maupun aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan ini masih tradisional dan tertinggal dibandingkan dengan penduduk lain di wilayah perbatasan. B2P3KS (Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial menyatakan pada tahun 2016 beberapa lokasi diantaranya 6 (enam) lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, disimpulkan bahwa lokasi tersebut masih minim pengelolaan datanya, keterbatasan pengetahuan akses program kesejahteraan sosial, kurangnya infrastruktur yang tidak memadai, dan kerumitan tahapan untuk melakukan pengaksesan program (Endro Winarno, dkk, 2016). Untuk saat ini terdapat 3 (tiga) isu utama wilayah perbatasan Republik Indonesia – RDTL yaitu isu kesenjangan pembangunan, masalah penetapan batas wilayah, dan masalah politik, hukum, dan keamanan. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat sehingga masih terjadi konflik di kawasan perbatasan.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kawasan perbatasan yang berbatasan darat dengan Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)

yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.179/2014 (Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

1. Minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten TTU yang perekonomian penduduknya rata-rata atau standar sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat per kapita per bulan berada di garis terbawah tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang meningkat menjadi sebesar 21,59 % dari tahun sebelumnya (BPS Kabupaten TTU, 2015) karena minimnya penghasilan dari masyarakat dan keterbatasan dalam kesempatan berusaha bagi masyarakat karena dilihat dari kondisi fisik geografis yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara maupun seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur beriklim tropis sehingga sebagian besar wilayah yang ada merupakan lahan kering. Selain itu, kurangnya keterampilan masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang kurang dalam mengelola sumberdaya lahan kering dan keterbatasan modal sarana untuk berinvestasi pada bidang perkebunan, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan meningkat, gizi buruk, serta akses permukiman yang sehat dan air bersih yang tidak memadai.
2. Minimnya pendidikan serta sarana dan prasarana lainnya yang ditandai dengan minimnya sumber daya manusia di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Utara. Fasilitas kesehatan masih kurang memadai begitu juga dengan listrik dan telekomunikasi, perhubungan seperti jalan tidak memadai masih terdapat kondisi jalan yang rusak di kawasan perbatasan sehingga penduduk di wilayah perbatasan menjadi terisolir.
3. Terdapat permasalahan lingkungan hidup yang rusak akibat dari pemanfaatan hutan yang dialih fungsikan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat setempat. Selain itu juga kerusakan lingkungan hidup terjadi karena eksploitasi tambang mangan dan marmer secara terus-menerus dan

tidak memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada karena kurangnya pemahaman masyarakat kawasan perbatasan TTU dalam pengelolaan hasil pertambang yang ada.

4. Permasalahan keamanan di kawasan perbatasan TTU yang masih belum tuntasnya garis batas negara yaitu permasalahan batas wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Distrik Oecusse (Timor Leste) yang menimbulkan konflik karena terdapat titik-titik yang belum disepakati atau diputuskan. Di Kabupaten TTU, ada 6 (enam) lokasi yang bermasalah yaitu di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat dan Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Lokasi-lokasi ini sudah disepakati masuk dalam wilayah Timor Leste, namun masyarakat setempat menolak karena dalam pengambilan keputusan tidak dilibatkan (Kompas.com, 24/09/2016, diakses 1 Maret 2021). Selain itu juga kurangnya ketertiban di wilayah perbatasan dan penegasan peraturan-peraturan lintas batas sehingga masih terdapat pelintas batas ilegal.

Selain masalah aktivitas ilegal, potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur secara umum tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong tidak mendukung untuk pengembangan pertanian, dan hutan di sepanjang perbatasan bukanlah hutan produksi atau konversi, juga bukan hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi (Bappenas. 2004).

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar di kawasan perbatasan Kabupaten TTU yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban dan keamanan serta menghambat pembangunan di kawasan perbatasan. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk dapat menentukan strategi dan prioritas pengembangan di kawasan perbatasan yang hasilnya dapat dijadikan arahan perencanaan kawasan perbatasan di Kabupaten TTU kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa permasalahan utama yang ada di wilayah perbatasan Timor Tengah Utara yaitu masalah ketersediaan prasarana dan sarana. Dalam Lampiran Kesepakatan Rakerda Perbatasan Antar Negara Tentang Isu Strategis dan Mendesak Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan NTT - Timor Leste (Bappenas, 2018) kondisi sarana dan prasarana di wilayah perbatasan Kabupaten TTU terbatas baik transportasi, energi, telekomunikasi, permukiman dan air bersih sehingga menyebabkan wilayah perbatasan menjadi terisolir dan tertinggal. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jaringan jalan yang sebagian wilayah kabupaten TTU masih terdapat jalan rusak dan akses pelayanan publik daerah maupun menuju negara tetangga masih sangat minim hal ini dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Selain itu, sarana dan prasarana dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khususnya wilayah perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, listrik, pelayanan air bersih, penyediaan perumahan layak huni.

Sarana prasarana kesehatan di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan karena rendahnya fasilitas kesehatan yang belum melayani masyarakat wilayah perbatasan. Fasilitas pendidikan yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum memadai. Sebagian besar sudah ada dan tersebar di kawasan perbatasan namun jumlah sekolah terbatas sehingga tingkat pelayanan sekolah tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di setiap kecamatan yang selalu meningkat setiap tahun sehingga sebagian anak-anak di kawasan perbatasan tidak sekolah. Belum meratanya pelayanan jaringan listrik, komunikasi, air bersih serta perumahan sederhana layak huni karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di perdesaan atau daerah terpencil sampai saat ini belum menerima jaringan listrik, komunikasi dan air bersih dari pemerintah setempat.

Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) juga menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta

Karya Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yaitu pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan khususnya dalam meningkatkan pelayanan transportasi serta komunikasi dengan tujuan agar dapat membuka keterisolasian daerah, pemasaran produksi, meningkatkan pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penataan wilayah administrasi dan perbatasan karena penanganan kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal, kurang terpadu serta konflik penentuan kebijakan secara vertikal, sektoral dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia menyatakan kebutuhan mendesak Kabupaten Timor Tengah Utara di kawasan perbatasan yakni terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang menjadi kawasan prioritas. Ketujuh kecamatan tersebut termasuk dalam kawasan miskin khususnya untuk kebutuhan permukiman yang layak huni, listrik (mencakup 70 desa), air bersih (37.763 jiwa), pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, jalan dan jembatan dan kebutuhan komunikasi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016, diakses 20 Maret 2021).

Dari uraian masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu : Bagaimana strategi dan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi dan prioritas pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran dalam mencapai tujuan penelitian terdiri dari:

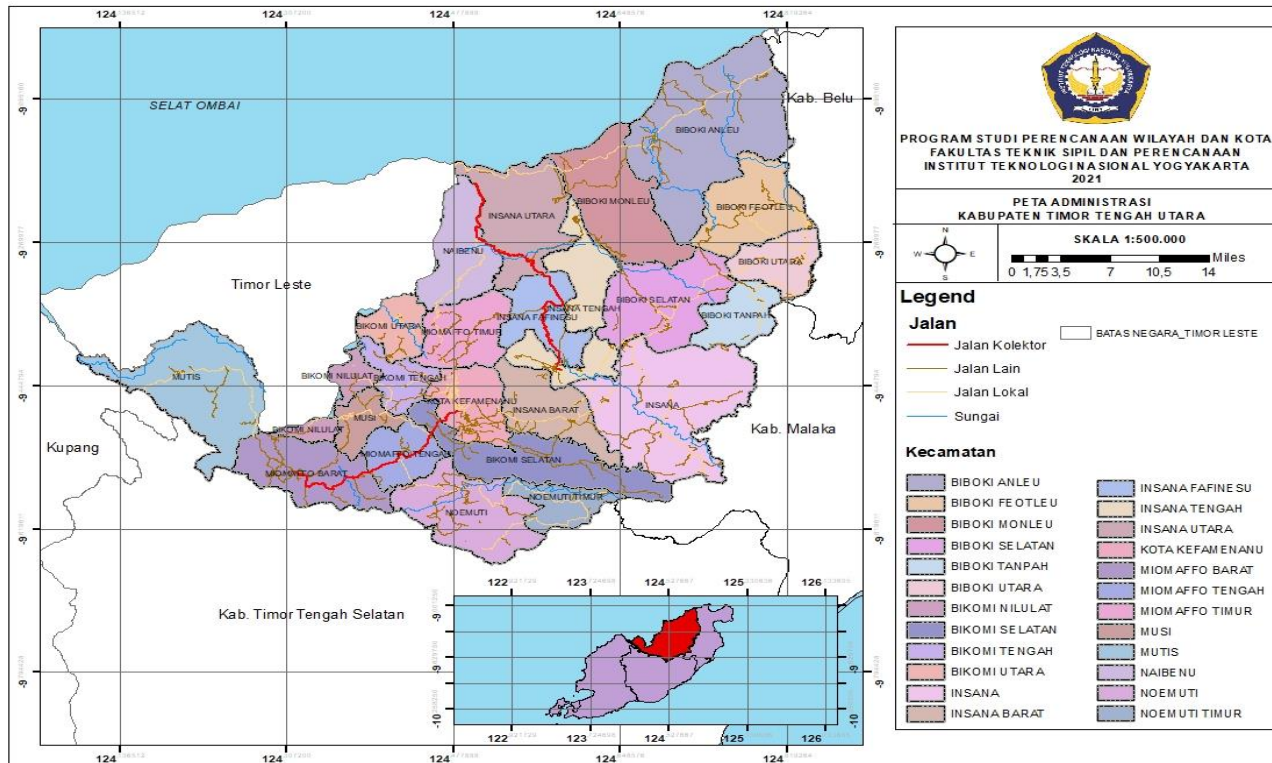
1. Mengidentifikasi aspek fisik dan sosial wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Menganalisis arahan strategi pengembangan wilayah perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Menentukan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi dalam penelitian ini mencakup wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di Kabupaten TTU. Adapun wilayah studi di tunjukan pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar I.1 Peta Administrasi Wilayah Studi

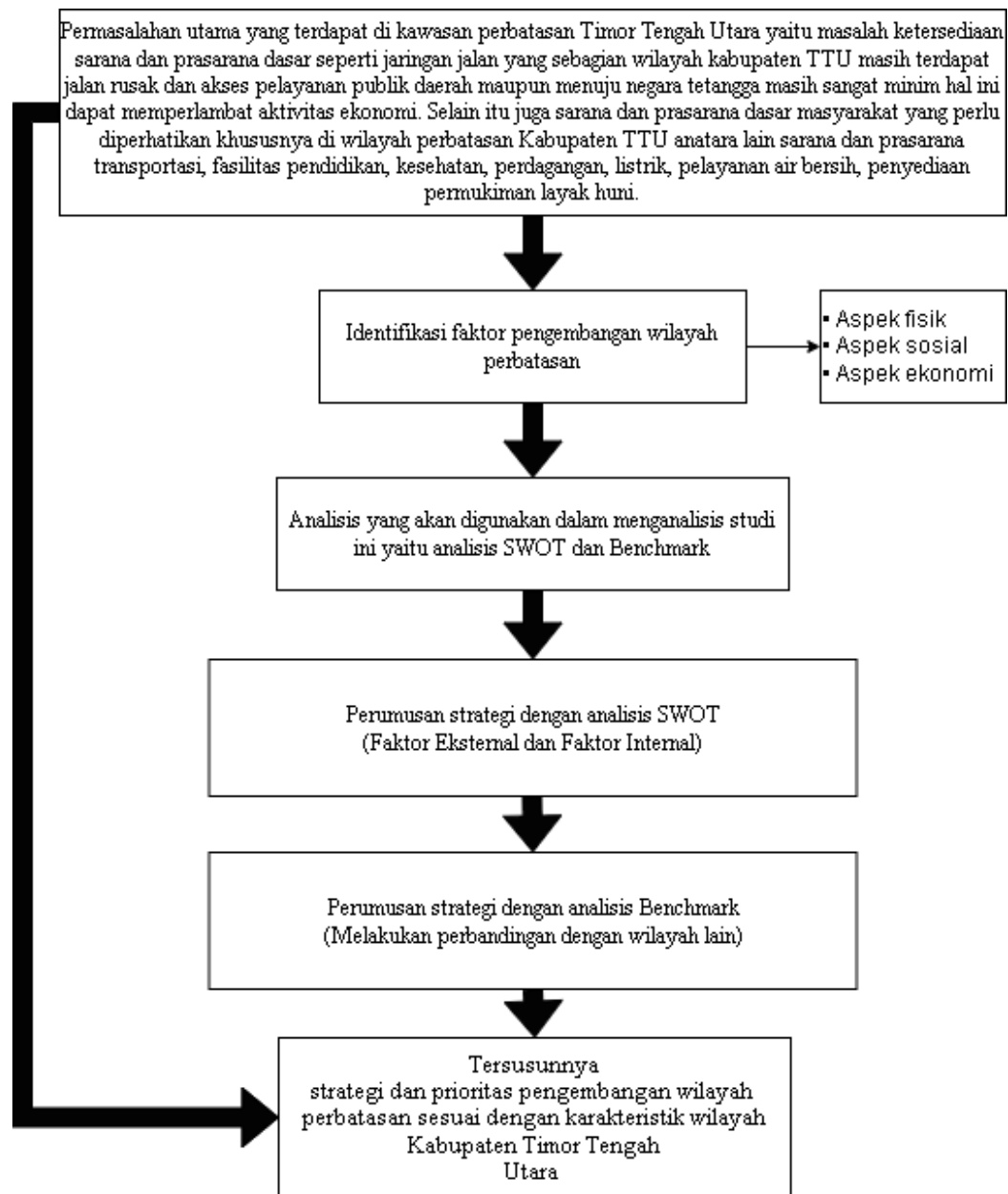
Sumber : Penulis, 2021

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup atau batasan materi pada penelitian ini adalah permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan yang menjadi fokus amatan yaitu aspek fisik yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana perbatasan maupun sarana dan prasarana umum di kawasan perbatasan. Aspek sosial yang meliputi struktur penduduk (jumlah penduduk kawasan perbatasan, jumlah penduduk berdasarkan : tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, umur dan tingkat pengangguran) serta aspek ekonomi yang meliputi aktivitas perekonomian masyarakat kawasan perbatasan (sektor basis di kawasan perbatasan). Selain itu juga membahas mengenai strategi dan prioritas yang layak digunakan untuk mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste. Dalam menganalisis strategi dan prioritas strategi dan prioritas pengembangan kawasan perbatasan akan menggunakan pendekatan SWOT dan analisis Benchmarking.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang menjelaskan secara umum gambaran proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran adalah penjabaran dari penelitian dan berfungsi untuk menjelaskan secara singkat dan jelas setiap tahapan dari penelitian tersebut. Kerangka penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam menjelaskan alur kegiatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui arahan strategi dan prioritas pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berikut gambar alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah ini:



Gambar 1.2 Alur Kerangka Pikir

1.6 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisikan uraian mengenai pokok-pokok permasalahan dari latar belakang mengapa perlu adanya melakukan penelitian di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara serta penjelasan mengapa mengambil judul penelitian tentang arahan strategi dan prioritas

pengembangan wilayah perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan juga dalam bab I ini menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian ini, ruang lingkup wilayah maupun materi, metode serta analisis yang digunakan dalam menganalisis penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau yang disebut kajian pustaka berisi teori, konsep maupun rumusan yang terdapat dalam literatur tertentu, yang berkaitan dengan topik yang dipilih diantaranya menjelaskan tentang teori arahan strategi, prioritas, pengembangan wilayah serta kawasan perbatasan. Kajian pustaka juga mendeskripsikan penelitian atau tulisan lain yang pernah dilakukan dan berhubungan dengan judul penelitian. Jumlah sumber disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan materi. Judul tinjauan pustaka harus terkait dengan topik TA.

3. Bab III Gambaran Umum

Gambaran umum wilayah studi merupakan gambaran kondisi suatu objek atau wilayah penelitian yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara yang berisikan kondisi geografis wilayah (luas daerah dan jumlah kecamatan) , karakteristik wilayah (topografi, iklim, hidrologi), demografi (jumlah dan pertumbuhan penduduk), sarana dan prasarana dan pariwisata atau potensi wilayah.

4. Bab IV Analisis

Bagian ini berisi penjelasan tentang analisis dari sasaran dalam penelitian arahan strategi dan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara. Bagian ini juga menjelaskan hubungan antara analisis yang satu dengan analisis yang lain jika meliputi lebih dari satu analisis. Dalam bab ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan analisis. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis SWOT dan Banchmarking.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis penelitian.

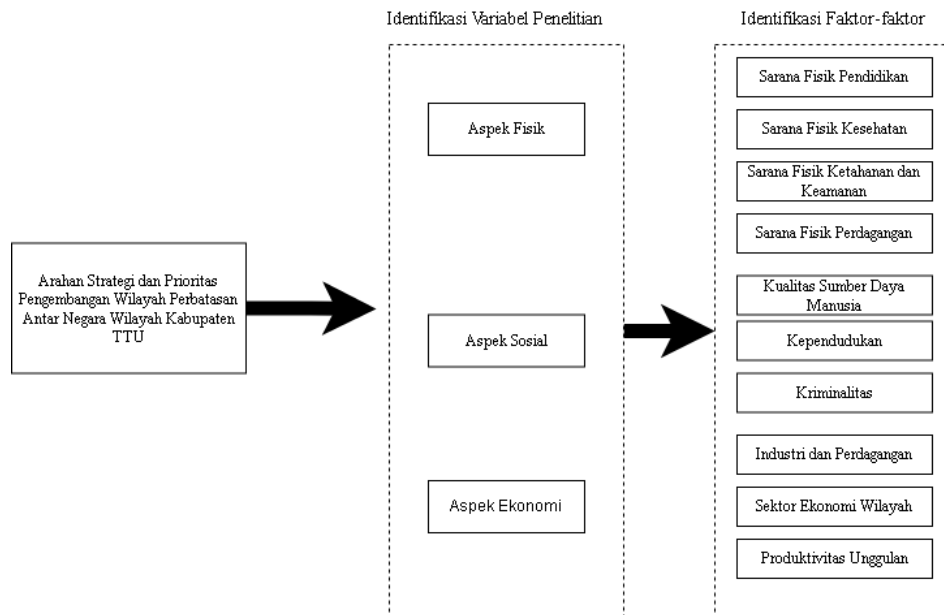
1.7 Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012).

Untuk itu dalam penelitian terhadap arahan strategi prioritas pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten TTU, data sekunder lainnya diperoleh melalui media informasi (jurnal, media cetak dan lainnya) yang merupakan studi atau kajian terdahulu dan kebijakan yang ada tentang pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul Arahan Strategi Dan Prioritas Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara membutuhkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori menjadi variabel yang akan dipakai dalam mengidentifikasi prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar negara di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)



Gambar I.3 Variabel Penelitian (Sumber: Olahan Penulis, 2022)

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Untuk mengidentifikasi arahan strategi dan prioritas pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo maupun dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014). Menurut Semiawan (2010) metode kualitatif menggunakan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Disini informasi partisipan sangatlah bermanfaat. Metode kualitatif memberikan ruang bagi partisipan dalam menyampaikan informasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah kalimat atau deskripsi kata yang akan diolah oleh peneliti.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah studi pustaka, media massa, lembaga pemerintahan atau swasta, dan lainnya.

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini peneliti mencari data yang diperoleh dari instansi terkait dalam pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Data sekunder lainnya diperoleh melalui media informasi (jurnal, media cetak dan lainnya) yang merupakan studi atau kajian terdahulu dan kebijakan yang ada tentang pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti dan juga hambatan lainnya yang disebabkan oleh kebijakan dan aturan di masa pandemi Covid-19 oleh karenanya maka dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder pada penelitian ini dimana dapat diperoleh melalui:

1. Badan Pembangaunan Daerah Kabupaten TTU
2. Badan Pusat Statistik (BPS)
3. Data Pustaka

1.9 Kebutuhan dan Cara Memperolehnya

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong,2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang dibutuhkan. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber daya yang sudah ada. Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan. Data yang didapat berupa kajian-kajian tentang kawasan perbatasan Kabupaten TTU. Data sekunder lainnya diperoleh melalui media informasi baik itu

elektronik *online (internet)* maupun media cetak dan jurnal. Data tersebut berupa studi-studi terdahulu dan kebijakan tentang Kawasan Perbatasan Kabupaten TTU.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data aspek fisik, sosial dan ekonomi. Aspek fisik berupa data ketersediaan sarana dan prasarana perbatasan (kantor bea dan cukai, kantor imigrasi, serta pos keamanan) serta ketersediaan sarana dan prasarana umum di kawasan perbatasan. Aspek sosial berupa data jumlah penduduk kawasan perbatasan serta jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Aspek ekonomi berupa data jenis pekerjaan masyarakat serta pendapatan masyarakat setempat. Dari data aspek fisik dapat diketahui faktor sarana prasarana dan keamanan, aspek sosial dapat diketahui faktor pendidikan dan sumber daya manusia yang ada di kawasan perbatasan, dan dari data aspek ekonomi dapat diketahui perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Kebutuhan data pada penelitian Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini:

Tabel I.1 Kebutuhan Data

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Sumber Data	Keluaran
1.	Mengidentifikasi aspek fisik, sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten TTU	<p>Fisik :</p> <p>Kondisi sarana dan prasarana yang ada di kawasan perbatasan.</p> <p>Sarana dan Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Transportasi/Aksesibilitas • Air Bersih • Listrik • Fasilitas Perdagangan • Pos Pelayanan Lintas Batas 	<p>Sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data BPS • BAPPEDA • Data Pustaka 	Mengetahui kondisi sarana dan prasarana wilayah kawasan perbatasan
		<p>Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Jumlah Penduduk • Penyebaran Penduduk • Kesenjangan Sosial • Kualitas Pendidikan 	<p>Sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data BPS • BAPPEDA • Data Pustaka 	Mengetahui kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk dan penyebaran penduduk, kesenjangan sosial dan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten TTU

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Sumber Data	Keluaran
		Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Mata Pencaharian • Aktivitas Ekonomi • Penghasilan 	Sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Data BPS • BAPPEDA • Data Pustaka 	Mengetahui jenis pekerjaan serta pendapatan masyarakat setempat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten TTU
2	Menentukan strategi pengembangan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara	Fisik Sosial Ekonomi	Sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Data BPS • BAPPEDA • Data Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui faktor internal dan eksternal kawasan perbatasan • Merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan
3	Menentukan prioritas pengembangan kawasan perbatasan antar negara di Kabupaten Timor Tengah Utara	Fisik Sosial Ekonomi	Sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Data BPS • BAPPEDA • Data Pustaka 	Merumuskan prioritas pengembangan kawasan perbatasan

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

1. Analisis SWOT

Menurut Irham (2013) Analisis SWOT menilai antara faktor luar perusahaan (peluang dan ancaman) dengan faktor dalam perusahaan (kekuatan dan kelemahan). Faktor dalam perusahaan termasuk kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*) sedangkan faktor dari luar perusahaan termasuk kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal atau EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*).

Matrik SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Tahapan dalam proses analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menganalisa seluruh data relevan terhadap permasalahan yang diteliti meliputi Aspek fisik, Aspek sosial dan Aspek Ekonomi pada wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
2. Menganalisa data dengan membandingkan faktor internal (*strengths* dan *weaknesses*) dengan faktor eksternal (*opportunities* dan *threats*) dengan memanfaatkan model yang digunakan sebagai perumusan strategi yakni matriks SWOT yang terdiri dari matriks IFAS dan matriks EFAS.
3. Mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat digunakan untuk strategi dan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten TTU menggunakan analisis SWOT.

4. Membuat pembahasan dan simpulan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah *benchmarking*. Proses *benchmarking* biasanya terdiri dari beberapa langkah yaitu (Ramli, 2013):

1. Menentukan apa yang akan di *benchmarking*

Dengan melihat pada fakto-faktor yang menjadi potensi pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten TTU dari 3 aspek yang ditentukan diantaranya adalah: aspek fisik, aspek sosial dan aspek ekonomi

2. Menentukan apa yang akan diukur

Melakukan *benchmarking* pada variabel-variabel dari faktor eksternal dan faktor internal penentu pengembangan wilayah perbatasan diantaranya adalah sarana fisik pendidikan, sarana fisik kesehatan, fasilitas perdagangan, ketersediaan air bersih, PLB, Aksesibilitas dan mobilitas, Industri, produktifitas, kriminalitas dan kualitas sumberdaya manusia

3. Menentukan kepada siapa akan dilakukan *benchmarking*

Benchmarking dilakukan dengan potensi pengembangan wilayah perbatasan di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau yang merupakan wilayah perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia

4. Pengumpulan Data

Pada langkah keempat melakukan pengumpulan data mengenai hasil variabel-variabel yang sudah di *benchmarking*.

5. Analisis data

Menentukan strategi untuk menutup Gap.

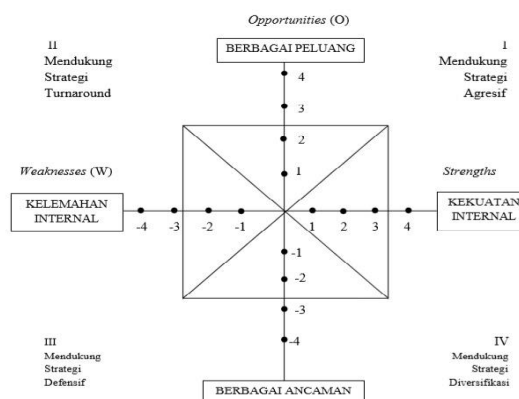
6. Merumuskan tujuan dan rencana tindakan

Pada langkah terakhir diberikan solusi dalam pelaksanaan strategi dan prioritas pengembangan wilayah yang sudah disimpulkan dari pengolahan data *benchmarking* untuk strategi pengembangan wilyah Kabupaten TTU

Adapun rumus untuk menghitung nilai bobot dan rating sebagai berikut:

- Nilai Bobot = $\frac{\text{Jumlah Kepentingan}}{\text{Jumlah Total Kepentingan}}$
- Nilai Rating = $\frac{\text{Jumlah Rating}}{\text{Banyaknya Responden}}$
- Skor = Nilai Bobot x Nilai Rating

Berikut gambar 1.4 Diagram Analisis SWOT adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Diagram Analisis SWOT

A. Matrik SWOT

Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi wilayah dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah. Matrik SWOT dikembangkan berdasarkan analisis SWOT yang akan menghasilkan beberapa pilihan strategi. Melalui analisis SWOT ini diharapkan akan dapat diketahui akar masalah yang ada, potensi dan kekuatan yang dapat diberdayakan dalam pembangunan daerah, menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan membuat metode pemecahan masalah serta metode untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi-strategi S+O, Strategi S+T, Strategi W+O, dan Strategi W+T. Berikut gambar 1.5 Matriks SWOT:

IFE	STRENGTHS (S) Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal
EFE		
OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS (T) Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 1.5 Matriks SWOT

2. Analisis Benchmarking

Benchmarking adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau lebih bisnis proses perusahaan dengan perusahaan yang terbaik di proses bisnis tersebut, untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan peningkatan proses bisnis (Andersen, 1996 dikutip oleh Paulus dan Devie, 2013) David Kearns (CEO Xerox) juga mendefinisikan *benchmarking* sebagai suatu proses pengukuran terus menerus atas produk, jasa dan tata cara perusahaan terhadap pesaing yang terkuat. *Benchmarking* juga merupakan suatu proses yang membandingkan dan mengukur kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain guna mendapatkan keuntungan informasi yang akan digunakan untuk perbaikan secara kontinyu (Tatterson, 1996 dikutip oleh Paulus dan Devie, 2013).

Terdapat tujuh macam benchmarking berikut penjelasannya yaitu (Ramli, 2013):

1. *Internal benchmarking*

Memberikan perbandingan antara operasi atau proses yang sejenis dalam korporasi.

2. *Competitive benchmarking*

Memberikan perbandingan antar pesaing untuk produk atau layanan tertentu (spesifik).

3. *Financial benchmarking*

Dipakai untuk mengukur kembalinya investasi (*return on investment*) dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Financial benchmarking, dengan menggunakan RONA (*return on net asset*) akan diketahui business driver mana yang paling tinggi memberikan return.

4. *Process benchmarking*

Memfokuskan pada proses kerja atau sistem operasi tertentu (misal pembayaran, *rekrutmen*, komplain pelanggan, pengadaan) untuk menghasilkan hasil pada *bottom line results*, seperti peningkatan produktivitas, mengurangi waktu siklus produk, pengurangan biaya, peningkatan penjualan, mengurangi laju kesalahan produksi, dan peningkatan keuntungan.

5. *Strategic benchmarking*

Digunakan untuk menguji bagaimana korporasi dapat bersaing dan fokus pada industri tertentu. Sasaran kuncinya adalah mengidentifikasi strategi yang unggul untuk menjadi korporasi yang berhasil.

6. *Product benchmarking*

Proses perancangan suatu produk baru atau pengembangan produk yang telah ada. Proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk berdasarkan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahannya.

7. *Investor perspective benchmarking*

Melakukan perbandingan antar korporasi dengan menciptakan alternatif kesempatan berinvestasi dengan membangun pandangan positif bagi investor

1.10.1 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan atau tahapan persiapan ada beberapa tahapan yaitu:

- a) Merumuskan masalah yang ingin dibahas. Perumusan masalah dilakukan pada waktu pengajuan usulan penelitian dan diulangi kembali pada waktu penulisan laporan karena rumusan masalah merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipindahkan.
- b) Peneliti menentukan tempat atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c) Menyusun proposal penelitian skripsi di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
- d) Mengurus surat izin. Dalam hal ini peneliti mengurus surat di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITNY. Surat izin penelitian ini berfungsi sebagai bukti bahwa bisa melakukan penelitian di tempat atau lokasi yang menjadi tempat penelitian.

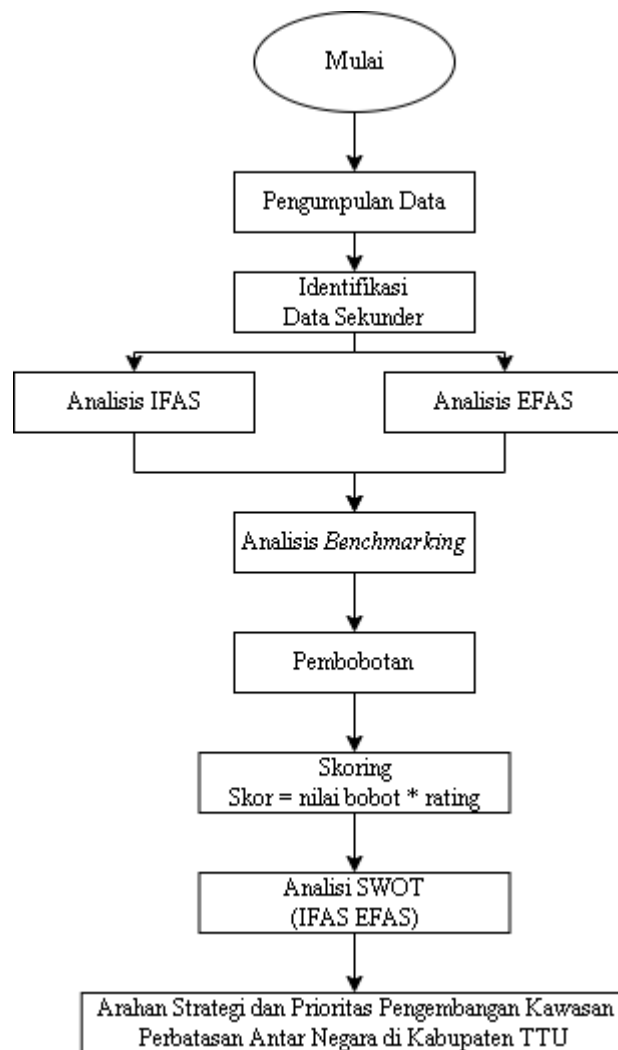
1. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap bekerja di lapangan yang meliputi tahap pengumpulan data dan tahap penyusunan data.

2. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir. Dalam tahap pelaporan peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis dengan data yang didapat.

Berikut gambar 1.7 diagram alir tahapan penelitian dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 1.6 Diagram Alir Tahapan Penelitian